



**PERKEMBANGAN PERUMAHAN DAN DIVERSIFIKASI MATA
PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN UNGARAN BARAT
DAN UNGARAN TIMUR**

Puji Hardati*

Dosen Jurusan Geografi FIS - Unnes

Info Artikel

Sejarah Artikel

Keywords:

*dengue hemorrhagic fever (DHF),
GIS,*

Abstract

This research aims to study the development of housing and livelihood diversification, population located in the Subdistrict of West and East Ungaran. The methods used to analyze the housing development process approach is use to analyze the spatial pattern of housing, with the nearest neighbor analysis, and to study the livelihood diversification using descriptive analysis. Based on these studies, the housing in the two districts ranging from 1986 until the year 2009 experienced a very rapid development, from the original only in one location in a village into 37 unit with locations spread over 12 village/town. Settlement patterns in the two districts are spread that attempted by the numbers of 2.59 and 1, 73. The livelihood of most of the population is non agriculture and only 10 percent whose livelihoods in agriculture. All household livelihood to diversify to meet the necessities of life.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Tempat bermukim merupakan kebutuhan primer penduduk. Djoyohadikusumo dalam Daldjoeni (1983:17) menjelaskan bahwa dari sederetan kebutuhan hidup manusia yang meliputi pangan, sandang, permukiman, pendidikan, dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan lain sebagainya.

Amanat yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dalam Sumarsono (1995: 27) menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Penduduk manusia memilih ruang untuk permukiman mula-mula di wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, pemilihan lokasi permukiman bagi seseorang bervariasi tergantung dari berbagai faktor seperti tingkat ekonomi, sosial, budaya, aksesibilitas, kedekatan dengan fasilitas tertentu, kondisi geografis setempat, dan lain sebagainya. Manusia di satu sisi memilih lokasi tempat tinggal yang

strategis, pada lahan yang datar, dekat dengan fasilitas, dekat dengan tempat bekerja, dan sebagainya. Namun kenyataannya tidak semua tempat di muka bumi ini merupakan tempat tinggal yang ideal untuk dihuni.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan luas wilayah yang tidak bertambah dan bahkan berkurang akan menyebabkan permintaan akan tempat tinggal semakin meningkat. Sumaatmadja (1981: 191-192) memberikan penjelasan bahwa akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan lahan yang tidak stabil, yang terlalu miring, daerah yang tidak sehat, daerah yang kurang memenuhi syarat akan dijadikan permukiman. Setiap orang telah mengetahui bahwa pada saat ini jumlah penduduk di seantero muka bumi tidak terkecuali selalu bertambah dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk yang semakin banyak tersebut selalu membutuhkan tempat untuk bermukim. Pada dasa warsa terakhir, ada kecenderungan semakin sulit penduduk dalam memperoleh lahan untuk permukiman. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula diversifikasi matapecaharian. Kenyataan ini terasakan kondisinya di daerah Ungaran Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Ungaran Barat dan Timur. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkap “bagaimana perkembangan dan pola sebaran perumahan serta seperti apa diversifikasi matapecaharian penduduknya”.

Jumlah penduduk di suatu wilayah tidak pernah berkurang, tetap, tetapi setiap terjadi perubahan waktu pasti terjadi perubahan jumlah penduduk. Di dunia sampai tahun 2008 jumlah penduduk sudah mencapai 6,7

milyar (*World Population Data Sheet*, 2009). Jumlah penduduk dunia diperkirakan akan berjumlah menjadi 9 milyar pada tahun 2050, berarti bertambah hampir sepertiganya dari jumlah yang ada sekarang (PBB, 2006 :1). Jumlah penduduk yang semakin banyak juga diikuti oleh semua benua dan wilayah. Sehingga setiap benua dan juga wilayah jumlahnya tidak akan dapat sama. Pada posisi sekarang, benua Asia merupakan salah satu benua yang jumlah penduduknya paling banyak, yaitu mencapai lebih dari 60 persen dari penduduk dunia. Pada tahun 2000 jumlah penduduk di benua Asia mencapai 3.684 juta dan diperkirakan akan bertambah menjadi 4.723 juta pada tahun 2025 (*World Population Data Sheet*, 2009).

Berdasarkan sumber yang sama, Indonesia yang merupakan salah satu negara di benua Asia dengan jumlah penduduk cukup banyak, yaitu mencapai 212,20 juta pada tahun 2000, 230 juta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan menjadi 273,4 juta pada tahun 2025. Penduduk di Indonesia tidak sama di setiap wilayah dan propinsi. Propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibanding dengan propinsi di luar Jawa (BPS, 2005:11). Sedangkan di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6 % dari luas wilayah Indonesia ditempati lebih dari 60 % jumlah penduduk (SP, 2000). Jawa Tengah menempati urutan kedua setelah Propinsi Jawa Timur dalam hal jumlah penduduknya, yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 33 juta jiwa (BPS, 2008).

Propinsi Jawa Tengah jumlah penduduknya sudah mencapai 32.397.431 jiwa

(BPS, 2005:11), distribusi penduduk polanya hampir sama dengan pola yang ada di Indonesia secara umum, yaitu tidak merata. Dari 35 wilayah kabupaten dan kota yang ada, paling banyak jumlah penduduknya adalah di Kabupaten Brebes yaitu mencapai 1.784.094 jiwa dan yang paling sedikit di kota Magelang yang hanya 123.576 jiwa. Kabupaten dan kota lainnya jumlah penduduk berkisar di antara jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut. Kabupaten Semarang yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan kota Semarang, pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk sebanyak 885.500 jiwa, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah tersebut akan menjadi 1.185.700 jiwa (BPS, 2006:11).

Semua penduduk tersebut memerlukan tempat bermukim untuk keperluan hidupnya. Kebutuhan permukiman untuk keperluan hidup penduduk semakin tahun semakin bertambah, dan pertumbuhannya sesuai dengan tingkat kemajuan kebudayaan dari penduduk itu sendiri. Semakin maju kebudayaan penduduk di suatu masyarakat akan semakin bertambah kebutuhan hidupnya (Sumarwoto, 1986:77).

Penduduk merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan, khususnya kebutuhan ruang hidup. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kebutuhan akan ruang meningkat, karena laju pertumbuhan penduduk akan menuntut adanya bangunan-bangunan fisik baru baik tempat tinggal atau saran lain. Tuntutan akan ruang dalam skala yang lebih khusus kawasan permukiman semakin perlu mendapat perhatian sejalan

dengan pertumbuhan penduduk. Kenyataannya kebutuhan ruang yang semakin meningkat jelas tidak diikuti oleh ketersediaan lahan. Keterbatasan ini menyebabkan perhatian orang beralih ke daerah pinggiran kota. Sebab di daerah pinggiran masih tersedia lahan relatif luas dan harga lahan relatif murah dibanding dengan harga lahan di daerah kota. Hal ini sesuai dengan pendapat Bintarto (1984) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk suatu wilayah yang cukup tinggi mempengaruhi wilayah sekitarnya. Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan di kota, sedangkan di daerah-daerah pinggiran mempunyai lahan yang masih luas dan harganya relatif murah, maka penduduk mencari tempat tinggal untuk bermukim di daerah pinggiran kota.

Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur lokasinya berbatasan dengan Kota Semarang yang menjadi ibukota Propinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu alternatif penduduk dalam menetapkan pilihannya untuk bertempat tinggal, sehingga selama dasa warsa terakhir terjadi perkembangan jumlah rumah penduduk.

Pemukiman penduduk adalah menyangkut tentang cara dan proses memindahkan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya (Depdikbud, 1989). Tempat tinggal atau tempat kediaman secara umum disebut permukiman. Pengertian permukiman yang dirumuskan dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1992 adalah sebagai area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, dan

merupakan bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan (Anonim, 1997:93). Selanjutnya permukiman penduduk adalah tempat tinggal yang merupakan hasil dari proses orang menempati suatu wilayah (Ritohardoyo, 2000:7). Tempat tinggal atau tempat bermukim terdiri dari rumah dan pekarangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kehidupan (Sutikno dan Su Ritohardoyo, 1996:7). Bintarto (1977) mengungkapkan bahwa permukiman dapat digambarkan sebagai suatu tempat atau daerah disitu ada penduduk berkumpul dan hidup bersama, tempat dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan-jalan, dan sebagainya guna kepentingan hidup mereka. Hal senada dikemukakan oleh Sumaadmadja (1981), yang menyatakan bahwa permukiman dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang dihuni manusia dengan segala sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan penduduk yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Sedangkan Barlow dan Newton (1971) memberikan pengertian permukiman adalah semua tipe tempat tinggal manusia baik satu gubug atau pondok tunggal yang beratap dedaunan, atau rumah-rumah di perladangan hingga kota yang sangat besar dengan ribuan bangunan atau ribuan rumah tempat tinggal.

Hammond (1979: 138) menjelaskan bahwa permukiman sebagai salah satu relasi manusia dengan lingkungan alam penelaahannya dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan. Pertama, yaitu kajian satuan-satuan permukiman sebagai

kesatuan tersendiri (lepas). Pendekatan studinya pada ukuran-ukuran permukiman, lokasi dan fungsi, serta morfologi permukiman. Kedua, kajian kelompok-kelompok permukiman sebagai bagian dari semua lingkungan fisik, dan pendekatan kedua menekankan studinya pada herarki permukiman, keruangan dan pengaruhnya. Ketiga, kajian masyarakat, permukiman sebagai gejala sosial ekonomis. Pendekatan ini meliputi perkembangan permukiman, penduduk dan keterpaduan sosial.

Yunus (1987) memberikan penjelasan bahwa permukiman perkotaan maupun perdesaan secara individual dapat menyoroti salah satu atau beberapa elemen kesatuan permukiman. Beberapa faktor akan berpengaruh terhadap struktur permukiman. Penyesuaian manusia terhadap lingkungan alam awalnya dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik alam seperti iklim, tanah. Tingkat penyesuaian tergantung pada kultur dan peradaban penduduk. Akhir-akhir ini ada kecenderungan penyesuaian lebih mengarah pada pertimbangan atau faktor sosial dan ekonomi penduduk.

Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan diungkapkan dalam bentuk interaksi dan interdependensi manusia dengan alam. Hasil interaksi dan interdependensi tercermin pada *artificial features* sesuai dengan kemampuannya *memanage* dan mensikapi lingkungan. Selain faktor fisik, faktor demografi juga berperan dalam memberikan pengaruh terhadap struktur permukiman penduduk.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur, hal ini didasarkan pada dua kecamatan ini sebelum tahun 2008 masih menjadi satu yaitu Kecamatan Ungaran. Teknik pengumpulan data: Metode Dokumentasi: Metode ini digunakan untuk menjangkau data sekunder atau data yang sudah tersimpan di instansi atau lembaga terkait. Metode Observasi dan pengukuran lapangan. Melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dimana peneliti melakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap lokasi objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan yang akan diamati oleh peneliti berupa persebaran lokasi, kondisi objek, kondisi prasarana wilayah dan morfologinya. Peneliti melakukan pengukuran secara langsung pada obyek-obyek yang akan diteliti dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) dan selanjutnya dipetakan ke dalam komputer yang didukung dengan *software Arc View GIS 3.3*. c) Metode wawancara: dalam wawancara digunakan angket (kuesioner) berupa sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Analisis data penelitian dilakukan dengan beberapa cara. Analisis diskriptif dikenakan khususnya pada data sosial ekonomi penduduk (termasuk mata pencaharian) dari kuesioner, dan data kualitatif hasil observasi. Perkembangan perumahan digunakan analisis proses, pola permukiman digunakan peta, dengan rumus tetangga

terdekat (T) (Bintarto dan Surastopo, 1979:75), adalah sebagai berikut.

$$T = \frac{Ju}{ju}$$

keterangan :

T = indeks penyebaran tetangga terdekat

Ju = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

ju = jarak rata-rata yang diperlukan andaikata semua titik mempunyai pola random

$$= \frac{1}{2Vp}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Pola Persebaran Perumahan

Perkembangan Perumahan

Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pada Pasal 1, mengamanatkan bahwa rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunia dan sarana pembinaan keluarga. Blaang (1986) memberikan pengertian rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari ([www.](http://www.ArchitectureLectures.com/C.Djemabut)

[ArchitectureLectures.com/C.Djemabut](http://www.ArchitectureLectures.com/C.Djemabut). 19 April 2009). Sedangkan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. Perumahan dan permukiman merupakan kesatuan fungsional, sebab pembangunan perumahan harus berlandaskan suatu pola permukiman yang menyeluruh, yaitu tidak hanya meliputi pembangunan fisik rumah saja, melainkan juga dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial, baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, keduanya mempunyai permasalahan majemuk dan multidimensional yang berbeda.

Jumlah perumahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, mulai tahun 1986 sampai tahun 2009 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan baik jumlah lokasi unit dan rumahtangga yang bertempat tinggal di perumahan tersebut. Berdasarkan perkembangannya, pada tahun 1986 hanya ada 1 unit perumahan, dan sampai tahun 1999 bertambah menjadi 11 unit perumahan, dari tahun 2000 sampai tahun 2009 bertambah 26, sehingga jumlahnya menjadi 37 unit.

Tabel 1. Perkembangan Lokasi Perumahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur Tahun 1986-2009

No Tahun	Unit	Lokasi
1 1986	1	Ungaran Timur
2 1987	1	Ungaran Timur
3 1990-1999	72	Ungaran Timur
4 2000-2009	917	Ungaran Barat
5 1986-2009	37	Ungaran B + T

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Semarang dan Hasil Penelitian

Tabel 2. Perumahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur Tahun 2008

No	Lokasi	Persen
1	Kecamatan Ungaran Barat dan Timur	48,77
2	Di luar wilayah Kecamatan Ungaran barat dan timur	51,23
3	Kabupaten Semarang	100,00

Sumber : Dinas Cipta Karya Kabupaten Semarang Tahun 2008, dan diolah

Berdasarkan lokasinya juga mengalami perkembangan secara keruangan. Perumahan yang pada awalnya hanya ada di satu desa/kelurahan yaitu di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, sampai tahun 2009, terdapat 37 unit perumahan yang tersebar di 12 desa/kelurahan, di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Tahun 1986-1990, Kecamatan Ungaran Timur menjadi pilihan para pengembang untuk membangun perumahan, tetapi pada waktu selanjutnya, yaitu mulai tahun 2000 sampai tahun 2009, perumahan sudah merambah ke Kecamatan Ungaran Barat.

Pola Sebaran Perumahan

Pola sebaran perumahan di tingkat kecamatan, maka hanya dilihat dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ungaran Barat

dan Ungaran Timur. Di Kecamatan Ungaran Barat, berdasarkan angkat dari analisis tetangga terdekat (Bintarto, 1979) diperoleh perhitungan bahwa nilai $t = 2,59$. Sedangkan di Kecamatan Ungaran Timur nilai $t = 1,73$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola sebaran permukiman penduduk di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur seragam yakni menyebar.

Di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur penambahan jumlah permukiman sangat tinggi, karena dua kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Semarang Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dan paling dekat jaraknya, paling tinggi aksesibilitasnya, serta tersedia hampir semua fasilitas kebutuhan penduduk baik kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selain itu akses penduduk ke sarana prasarana sosial, ekonomi, juga tinggi.

Sampai Tahun 2008, jumlah perumahan yang ada di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur mencapai hampir separuh dari *real estate* yang ada di Kabupaten Semarang.

Jumlah rumah yang ada di perumahan tersebut, walaupun hampir separuh dari

jumlah rumah di perumahan, tetapi apabila dilihat dari jumlah rumah yang ada di dua kecamatan tersebut sebenarnya baru mencapai sekitar 10 persen dari jumlah bangunan rumah secara keseluruhan.

Tabel 3. Jenis Bangunan Rumah di Ungaran Barat dan Ungaran Timur Tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Bangunan Rumah			
		Jumlah	Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
1	Ungaran Barat	16.646	86,30	4,67	9,03
2	Ungaran Timur	17.539	66,62	27,07	6,31

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2009

Jumlah rumah yang ada dua kecamatan tersebut mencapai 34.185 buah rumah. Daerah Kecamatan Ungaran Barat, jumlah rumah dengan bangunan permanen lebih banyak, yaitu mencapai 86,30 persen, sedangkan di Ungaran Timur jumlah rumah dengan bangunan permanen hanya 66,62 persen. Tetapi di Ungaran Barat juga memiliki jumlah rumah dengan bangunan tidak permanen yang lebih banyak dibandingkan dengan bangunan rumah tidak permanen di Ungaran Timur. Hal ini disebabkan oleh adanya fungsi Kecamatan Ungaran Barat, yaitu menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan pusat kota Kabupaten Semarang, sehingga banyak penduduk pendatang yang sifatnya *boro* atau sementara, yang menganggap jenis bangunan tempat tinggal tidak menjadi hal penting. Mereka berdomisili di

Kecamatan Ungaran Barat tidak permanen, rumah seadanya, sekedar untuk berteduh dalam mencari nafkah. Selain itu mereka sudah memiliki rumah permanen di desa tempat asal mereka. Inilah yang menyebabkan adanya fenomena mengapa di Kecamatan Ungaran Barat lebih banyak bangunan rumah tidak permanen.

Dilihat jenis bangunan, sebagian perumahan dengan sifat bangunan permanen, dengan jenis bangunan termasuk kelas menengah dan mewah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tunner (1968) yang menyatakan bahwa ada empat dimensi bergerak secara paralel mobilitas tempat tinggal yang terjadi di suatu wilayah, yaitu dimensi lokasi, dimensi perumahan, dimensi siklus kehidupan, dan dimensi penghasilan. Hal ini terkait dengan harga rumah itu sendiri, selain lebih murah dan terjangkau,

karena sebagian besar adalah penduduk yang berumah tangga baru dengan jumlah anggota rumah tangga relatif sedikit.

Berasarkan jenis bangunnya, maka sebagian besar (80 %) termasuk menengah dan (10 %) termasuk jenis bangunan mewah. Dan ada jenis bangunan di perumahan yang termasuk sederhana (walaupun hanya 10 %). Umumnya jenis bangunan ini masih asli belum mengalami perbaikan, dan yang menempati sudah pensiun. sifat bangunan yang ada di perumahan semua termasuk permanen, baik dengan jenis bangunan sederhana, menengah, dan mewah. Jenis bangunan yang mewah dan sederhana hanya 10 %, sedangkan yang menengah mendominasi jumlahnya mencapai 80 %.

Kondisi Demografi - Ekonomi dan Diversifikasi Matapencarian

Kondisi Demografi dan Ekonomi Kepala Keluarga di Perumahan

Kondisi demografi adalah suatu ciri yang dimiliki seseorang dan melekat pada dirinya. Karakteristik demografi meliputi jenis kelamin, umur, status kawin, jumlah anak dan jumlah anggota keluarga. Untuk memberikan gambaran tersebut di daerah penelitian adalah sebagai berikut.

Berdasarkan jenis kelaminnya, maka sebagian besar kepala keluarga di perumahan real estate didominasi oleh laki-laki yaitu mencapai 95 %, dan hanya 5% yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan berdasarkan status kawinnya, maka yang 95% kepala keluarga tersebut adalah berstatus kawin, dan yang 5% berstatus janda.

Penduduk di perumahan hampir semua (96,66 %) adalah penduduk pendatang, karena hanya ada 3,33 % penduduk asli, dan itupun tidak dari desa dimana lokasi perumahan tersebut, tetapi dari desa sekitar, atau desa di luar lokasi perumahan. Berdasarkan lama bertempat tinggal, maka penduduk di perumahan yang lama bertempat tinggal sudah lebih dari sepuluh tahun mencapai 56,66%, dan hanya 10% dengan lama bertempat tinggal kurang dari 5 tahun.

Pendidikan yang dimiliki penduduk akan menentukan jenis pekerjaan yang ditekuni. Suami atau kepala keluarga di perumahan 80% memiliki pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil atau pensiunannya, dan hanya 20% yang memiliki pekerjaan di sektor swasta, dan swasta yang ditekuni termasuk memiliki status yang baik. Sedangkan para isteri yang bertempat tinggal di perumahan, hampir 50% bekerja sisanya menjadi ibu rumah tangga.

Pekerjaan dan Diversifikasi Mata Pencarian

Diversifikasi perdesaan sebagai proses semakin pentingnya kegiatan dan pendapatan non-pertanian bagi rumah tangga perdesaan dipahami sebagai suatu konsekuensi meningkatnya kegiatan komersial dan/atau industri yang berhubungan dengan sektor pertanian maupun tidak, baik yang berlokasi di desa maupun di kota terdekat (Rijanta dan Suhardjo, 2003). Akhir-akhir ini, faktor sosial budaya lebih memberikan peran dalam membentuk struktur permukiman penduduk.

Di daerah penelitian, diversifikasi

dilakukan melalui mata pencaharian yang dilakukan oleh kepala keluarga dan istri. Rumah tangga yang melakukan diversifikasi mata pencaharian mencapai 90%. Dari jumlah tersebut, ada 10% rumah tangga yang melakukan diversifikasi pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan (Rijanta, 2006) yang menjelaskan bahwa diversifikasi pada tingkat mikro dapat dijelaskan bahwa rumah tangga non-pertanian cenderung memiliki kontrol terhadap lahan melalui berbagai mekanisme, khususnya desa-desa bercorak *rural*. Rumah tangga non-pertanian mampu memperoleh lahan pertanian dari rumah tangga lain melalui hubungan jual beli, gadai, bagi hasil, maupun sewa sehingga mereka dapat memperoleh lahan selain dari warisan.

Rumah tangga perumahan memiliki rata-rata anak 3 orang dengan rata-rata anggota rumah tangga adalah 5 orang. Rijanta (2006) juga menjelaskan bahwa variabel demografi yang berkaitan dengan partisipasi kegiatan non-pertanian adalah ukuran rata-rata jumlah anggota rumah tangga dan struktur rumah tangga non-pertanian.

Pekerjaan yang ditekuni seseorang akan berkait dengan jumlah atau besarnya penghasilan yang diterima. Pada umumnya seseorang yang memiliki pekerjaan pada jenis pekerjaan yang relatif lebih mantap akan memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Penghasilan penduduk yang bertempat tinggal di perumahan rata-rata tiga juta seratus ribu rupiah setiap bulan, dengan penghasilan minimal satu juta dan maksimal empat setengah juta rupiah setiap bulan. Sebagian besar mengelompok pada

pendapatan lebih dari empat juta rupiah setiap bulan.

Besarnya penghasilan keluarga akan berpengaruh terhadap jenis bangunan rumah yang di tempat. Penduduk dengan penghasilan lebih tinggi pada umumnya menempati rumah dengan jenis bangunan yang relatif lebih baik dibanding dengan penduduk dengan penghasilan lebih rendah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tunner (1968) yang telah memberikan penjelasan bahwa ada empat dimensi bergerak secara paralel dengan mobilitas tempat tinggal yang terjadi di suatu wilayah. Keempat dimensi tersebut adalah dimensi lokasi, mengacu pada tempat-tempat tertentu pada suatu wilayah yang oleh seseorang/sekelompok orang dianggap cocok untuk bertempat tinggal pada kondisi dirinya. Kondisi diri ini lebih ditekankan pada penghasilan dan siklus kehidupannya. Lokasi pada konteks ini berkaitan erat dengan jarak terhadap tempat bekerja (*accessibility to employment*). Perspektif ini sering diistilahkan sebagai ruang geografi atau *geographical space*. Kedua, dimensi perumahan, diaitkan dengan aspirasi perorangan/sekelompok orang terhadap macam, tipe perumahan yang ada. Oleh karena luasnya aspek perumahan, dibatasi pada aspek penguasaan.

Mereka yang berpenghasilan rendah akan memilih menyewa, yang berpenghasilan tinggi memilih lokasi yang lebih baik. Daur kehidupan yang masih awal pada umumnya paralel dengan tingkat penghasilan yang rendah pula. Ketiga dimensi siklus kehidupan, membahas tahap-tahap seseorang mulai menapak dalam kehidupan mandirinya, dalam artian bahwa

semua kebutuhan hidupnya ditopang oleh penghasilan sendiri. Secara umum semakin lanjut tahap siklus kehidupan, semakin tinggi penghasilan atau *income*, sehingga kaitannya dengan dimensi satu dua lebih jelas. Dimensi keempat adalah penghasilan, menekankan pada besar kecilnya penghasilan yang diperoleh persatuan waktu. Dengan asumsi bahwa semakin lama seseorang menetap di suatu wilayah akan semakin mantap posisi matapencahariannya dan akan semakin tinggi tingkat penghasilannya persatuan waktu tetentu.

PENUTUP

Perumahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur mulai dari tahun 1986 sampai tahun 2009 mengalami perkembangan, baik jumlah rumah, jumlah unit, jumlah lokasi. Perumahan tersebut memiliki pola sebaran yang seragam atau menyebar. Perumahan tersebut memiliki berbagai tipe dan bangunan rumah semua permanen dengan jenis bangunan menengah dan mewah. Kepala Keluarga di perumahan mata pencahariannya dominan non-pertanian. Hampir semua rumah tangga melakukan diversifikasi matapencahariannya, dan tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan sampingan. Karakter penduduk memiliki karakteristik paling baik, jumlah anak paling sedikit, pendidikan lebih tinggi, jenis pekerjaan lebih terkonsentrasi pada jenis pekerjaan tetap, dan dengan penghasilan lebih tinggi, serta bangunan rumah semua permanen dengan jenis bangunan menengah dan mewah.

Saran yang dapat diungkapkan adalah perumahan dibangun harus memperhatikan aspek dan syarat perumahan yang sudah ditetapkan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memberikan izin menentukan lokasi perumahan. Lokasi perumahan yang jauh dengan fasilitas umum yang sudah tersedia memungkinkan penghuni melakukan kegiatan diluar pekerjaan pokoknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bintarto. 1976. *Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta. UD.Spring.
- Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta. LP3ES.
- Bintarto. 1984. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bunce, M. Pacione, Michael. Ed. *The Evolution of The Settlement Pattern. Progress Rural Geography*. London and Canberra. Croom Helm.
- Daldjoeni, N. 1978. *Manusia Penghuni Bumi. Bunga Rampai Geografi Sosial*. Bandung. Alumni.
- Hammond, Charles Whyne. 1979. *Elements of Human Geography*. London. George Allen and Unwin.
- Johnston, R.J. 1981. *The Dictionary of Human Geography*. England. Brasil Blackwell Oxford.
- Moseley, Malcolm. 1979. *Accessibility: The rural Challenge*. London. Methuen and Co Ltd.
- Pacione, Michael.. 1984. *Rural Geography*. London. Harper and Low Ltd.

- Rijanta. 2006. Rural Diversification in Yogyakarta Spatial Province : A Study Spatial Pattern, Determinants and the Consequences of Rural Diversification on the Livelihood of Rural Households. *Disertasi*. Fakultas Geografi UGM.
- Turner, John. 1968. "Housing Priorities, Settlement Pattern and Urban Development in Modernizing Countries" *Journal of the American of Planners* Vol.34 No.9, pp.354-363.
- (www.ArchitectureLectures.com/C.Djema but Blang/perkuliahahan arsitektur/registered/perumahan dan permukiman. 19 April 2009).

